

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak, baik dari segi pangan maupun nonpangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi ketika pendapatan atau pengeluaran per kapita seseorang berada di bawah garis kemiskinan yang merepresentasikan standar minimal kebutuhan hidup layak (BPS Provinsi Maluku, 2020). Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia membagi kemiskinan menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan relatif yang berkaitan dengan ketidakseimbangan pembangunan dan kemiskinan absolut yang menekankan kebutuhan dasar minimum untuk kelangsungan hidup (Wijaya & Nugroho Suryo Bintoro, 2024).

Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Ketidakadilan dalam kebijakan ekonomi dan politik menghambat akses masyarakat miskin terhadap berbagai peluang dan sumber daya. Kemiskinan juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga, yang menurunkan kualitas hidup masyarakat karena keterbatasan akses terhadap layanan penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Akibatnya, masyarakat miskin harus memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk bertahan hidup (Madaliyah & Rohmah, 2024).

Ketidakmampuan secara ekonomi atau keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup paling dasar serta ketidakmampuan untuk mencapai tujuan hidup yang diharapkan, seperti makan, memperoleh kebebasan, memperoleh hak-hak yang layak, dan menikmati kehidupan yang sejahtera dikenal sebagai kemiskinan (Melliny et al., 2019). Kemiskinan tidak hanya didefinisikan sebagai

ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga merupakan kondisi ketidakberdayaan yang disebabkan oleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang buruk, perlindungan hukum yang lemah, risiko terlibat dalam tindak kriminal, kemungkinan dihukum secara politik, dan keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup secara mandiri (Marsitadewi et al., 2022).

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada dasarnya, kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan pokok manusia seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pendapatan yang rendah biasanya menjadi penyebab ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, sementara pendapatan yang tinggi biasanya menjadi penyebab pengeluaran yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Marsitadewi et al., 2022).

Kemiskinan masih menjadi masalah yang serius dan menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, program, dan ahli untuk menanggulangnya. Kemiskinan adalah kondisi ketika sebagian penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan masih hidup di bawah standar hidup yang layak. Kemiskinan adalah masalah multifaceted yang mencakup aspek sosial, politik, dan ketimpangan kesempatan dalam masyarakat, selain berkaitan dengan aspek ekonomi. Oleh karena itu, kemiskinan menunjukkan hubungan yang kompleks antara seseorang dan lingkungannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup (Maharani et al., 2024).

Dalam pembangunan ekonomi, kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga merupakan bentuk kemiskinan yang

memiliki banyak aspek, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan publik, kualitas pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, dan kurangnya kesempatan kerja yang produktif kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai keterbatasan pendapatan (Penanggulangan, 2024). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan tren penurunan jangka panjang secara nasional, tetapi pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan yang signifikan. Persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,22% pada tahun 2019, tetapi meningkat menjadi 10,19% pada tahun 2020 karena perlambatan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan penurunan aktivitas sektor informal (Putri & Wulansari, 2022). Tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun setelah pandemi hingga mencapai 9,03 persen pada September 2024. Namun, angka ini tetap menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kemiskinan di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan di seluruh wilayah. Tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, selalu lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan Papua pada tahun 2024 masih di atas 25%, jauh lebih tinggi daripada rata-rata provinsi Pulau Jawa yang hanya di bawah 10% (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketimpangan di wilayah ini menunjukkan kemajuan ekonomi Indonesia yang belum merata. Dominansinya penduduk miskin yang bekerja di sektor informal, seperti pertanian subsisten, perdagangan kecil, dan jasa berupah rendah, pekerja sektor informal di Indonesia mencapai 59,17% atau

sekitar 84,13 juta orang menunjukkan fenomena kemiskinan struktural. Hampir 60% di Indonesia bekerja di sektor informal (Badan Pusat Statistik, 2024), yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan kurangnya perlindungan sosial. Akibatnya, sektor ini rentan terhadap guncangan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan bertahan lama dan sulit dihilangkan hanya dengan pertumbuhan ekonomi.

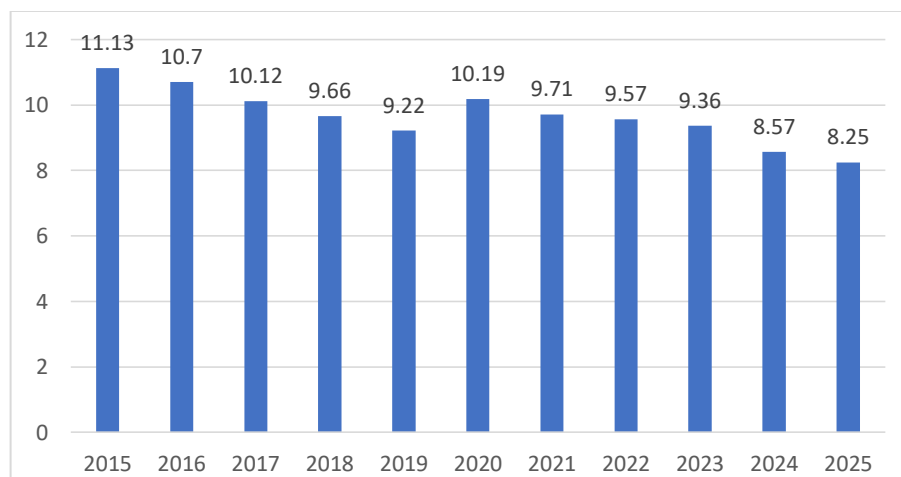
Kemiskinan di Indonesia terkait erat dengan sumber daya manusia yang rendah. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah biasanya ditemukan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, yang tercermin dalam rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Studi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah meningkatkan kemungkinan seseorang terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi (Putu et al., 2024). Fenomena ini mendukung gagasan bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki sifat struktural dan multidimensi dan tidak hanya sementara.

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurut evaluasi program-program tersebut, bantuan sosial berhasil menurunkan kemiskinan jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya mampu menangani masalah kemiskinan struktural. Meskipun banyak program yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan belum kunjung selesai (Nugroho, 2025).

Kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia menuntut penyelidikan empiris yang lebih komprehensif yang melibatkan pertimbangan berbagai faktor

ekonomi, sosial, dan institusional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memperluas akses ekonomi orang miskin, sementara demokrasi yang baik diharapkan dapat mendorong kebijakan publik yang lebih pro-miskin (Adawiyah, 2020). Oleh karena itu, kemiskinan dilihat sebagai fenomena multifaceted yaitu fenomena yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk politik, teknologi, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian tentang determinan kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia sangat penting dan strategis untuk mendukung pembuatan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tidak stabil selama periode 2015–2025 karena mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi nasional. Berikut grafik perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Gambar 1. 1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2026)

Grafik tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2015–2025 menunjukkan kecenderungan menurun dalam jangka panjang, meskipun sempat mengalami

kenaikan pada tahun tertentu. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan berada di angka 11,13% dan menjadi persentase tertinggi dalam periode pengamatan. Setelah itu, angka kemiskinan terus menurun menjadi 10,70% pada 2016, 10,12% pada 2017, 9,66% pada 2018, dan 9,22% pada 2019. Penurunan ini dikarenakan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan pada periode tersebut. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 10,19%. Kenaikan ini berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal dapat memengaruhi keberhasilan penurunan kemiskinan.

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan secara bertahap. Tahun 2021 turun menjadi 9,71%, tahun 2022 sebesar 9,57%, dan tahun 2023 sebesar 9,36%. Penurunan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi nasional, meningkatnya kesempatan kerja, serta berjalannya bantuan sosial pemerintah. Pada tahun 2024 angka kemiskinan turun lebih jauh menjadi 8,57% dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 8,25%, yang merupakan angka terendah selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil melanjutkan tren penurunan kemiskinan setelah masa krisis.

Tingkat kemiskinan di Indonesia juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan antarprovinsi. Secara spasial, wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada periode 2024–2025, tingkat kemiskinan di Papua masih berada di atas 30 persen, sedangkan NTT dan Maluku berada pada kisaran 18–

22 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Sebaliknya, provinsi di wilayah barat Indonesia, seperti DKI Jakarta, Bali, Banten, dan Kalimantan Selatan, mencatat tingkat kemiskinan relatif rendah, yaitu di bawah 6 persen, seiring dengan konsentrasi aktivitas ekonomi modern, teknologinya, kebijakan pemerintah yang inklusif serta kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

(E. Purwanti, 2024) didalam jurnalnya menyatakan bahwa baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Indonesia telah menurun. Tetapi kemiskinan masih lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan. Penduduk miskin biasanya usia muda, berpendidikan rendah, dan bekerja di pertanian. Oleh karena itu, tidak hanya peningkatan ekonomi yang diperlukan untuk memerangi kemiskinan, tetapi juga peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun berbagai kebijakan dan program penanggulangan telah dilaksanakan. Namun demikian, telah ada beberapa kemajuan dalam upaya pemerintah untuk mengakhiri kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai kebijakan yang dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan program-program yang dilaksanakan untuk menangkal kemiskinan. Upaya ini telah dilakukan sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Tingkat kemiskinan terus dikurangi oleh pemerintah, baik melalui penyempurnaan program yang sudah ada maupun dengan membuat kebijakan baru yang sesuai dengan kebutuhan selama setiap periode pemerintahan (Arliansyah et al., 2024).

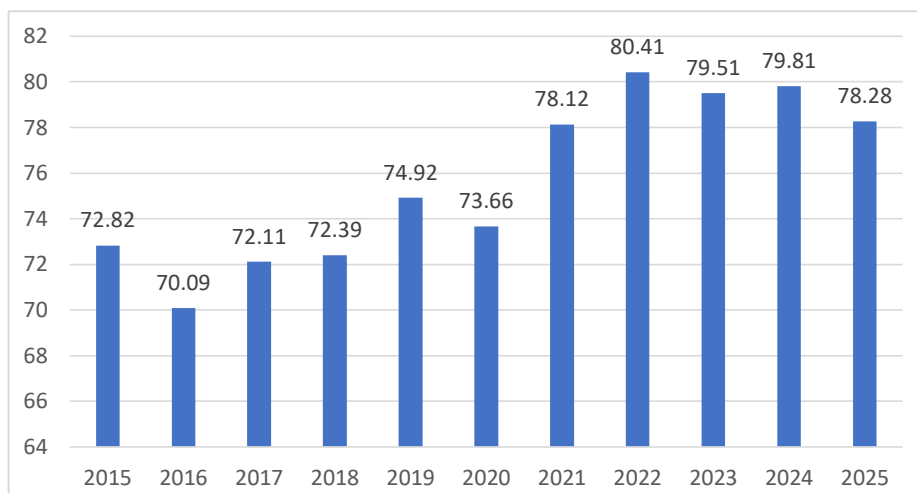
Dalam Penelitian (M. Purwanti et al., 2025) menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pendidikan, dan rendahnya pengangguran berperan signifikan dalam menekan kemiskinan regional, sehingga wilayah dengan struktur ekonomi yang lebih maju cenderung memiliki tingkat kemiskinan

yang lebih rendah. Dalam konteks pembangunan yang inklusif, demokrasi berperan penting dalam membentuk kebijakan publik yang berpihak pada kelompok miskin, terutama melalui peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) digunakan sebagai salah satu variabel independen dalam menganalisis determinasi kemiskinan antar provinsi di Indonesia.

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil Indeks Demokrasi, tingkat kemiskinan di Provinsi selama periode pengamatan 2010–2020 meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik demokrasi, yang tercermin melalui peningkatan partisipasi politik, kebebasan sipil, dan efisiensi pemerintahan, semakin besar peluang untuk membuat kebijakan publik yang membantu orang miskin, yang memungkinkan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan (Zainuddin & Makmur, 2024).

Dalam penelitian (Zainuddin & Makmur, 2024) mengatakan Demokrasi yang berjalan secara baik dan efektif dapat meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi yang berkualitas dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan. Berikut merupakan gambar grafik 1.2 indeks demokrasi indonesia dari tahun 2015-2025.

Gambar 1. 2 Indeks Demokrasi Indonesia 2015-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2026)

Berdasarkan Gambar 1.2, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2015–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2015 nilai IDI tercatat sebesar 72,82, kemudian menurun menjadi 70,09 pada tahun 2016. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan demokrasi, terutama pada aspek kebebasan sipil, partisipasi politik, dan kelembagaan demokrasi. Pada periode 2017 hingga 2019, nilai IDI kembali mengalami peningkatan secara bertahap, yaitu dari 72,11 pada tahun 2017, 72,39 pada tahun 2018, hingga 74,92 pada tahun 2019. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas demokrasi nasional serta meningkatnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Pada tahun 2020, nilai IDI kembali menurun menjadi 73,66. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan politik dan kebebasan berekspresi. Namun pada tahun 2021 hingga 2022, indeks demokrasi meningkat

cukup signifikan menjadi 78,12 dan mencapai 80,41 pada tahun 2022. Nilai tersebut merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan, yang menunjukkan semakin baiknya kualitas demokrasi di Indonesia.

Pada tahun 2023 nilai IDI sedikit menurun menjadi 79,51, kemudian meningkat kembali menjadi 79,81 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 indeks kembali turun menjadi 78,28, namun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan awal periode penelitian.

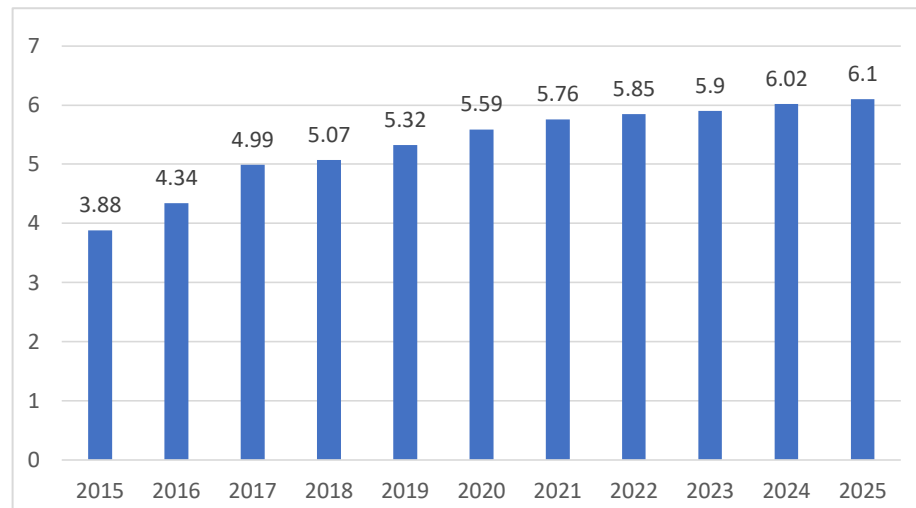
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi kemiskinan, termasuk bantuan langsung tunai, subsidi pangan, pembangunan perumahan murah, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan pelatihan. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, hasilnya masih beragam dalam pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan. Kualitas hidup masyarakat di beberapa daerah sangat meningkat, sementara di daerah lain masih ada masalah struktural seperti distribusi bantuan yang tidak merata, birokrasi yang kompleks, dan koordinasi antar lembaga yang buruk. Selain itu, faktor ekonomi lokal dan internasional seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kurangnya kesempatan kerja formal memengaruhi kemampuan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan (Saragih, 2015).

Variabel yang lain adalah Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang mencerminkan tingkat kemajuan digital suatu wilayah melalui ketersediaan infrastruktur, akses internet, serta pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat. Perkembangan TIK berperan signifikan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas akses pasar, serta membuka peluang kerja baru, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Kemajuan TIK memiliki

potensi untuk memberikan dampak besar pada berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Hal tersebut mengarah pada kemajuan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan mendorong kemakmuran, serta produktivitas dalam usaha ekonomi (Ishak & Kartiasih, 2025).

TIK memberdayakan masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi, sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik, memperoleh keterampilan dan kemampuan kerja, kegiatan ekonomi, serta keterlibatan tenaga kerja yang dapat meningkatkan pengentasan kemiskinan (Ishak & Kartiasih, 2025). Rendahnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. TIK memiliki peran penting dalam mempercepat penyebaran informasi, membuka berbagai peluang ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, akses terhadap TIK juga dapat memperluas kesempatan masyarakat, khususnya kelompok miskin, dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, peluang kerja, serta akses terhadap layanan keuangan (Devi Khoiriyah, 2024). Berikut merupakan gambar 1.3 mengenai Indeks TIK dari tahun 2015-2025.

Gambar 1. 3 Indeks TIK Tahun 2015-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2026)

Berdasarkan Gambar 1.3, perkembangan Indeks TIK Indonesia tahun 2015–2025 menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode pengamatan. Pada tahun 2015 nilai Indeks TIK berada pada angka 3,88. Selanjutnya meningkat menjadi 4,34 pada tahun 2016 dan 4,99 pada tahun 2017. Kenaikan pada periode awal ini menunjukkan mulai berkembangnya akses masyarakat terhadap teknologi digital, internet, dan sarana komunikasi. Selanjutnya tahun 2018 hingga 2020, indeks terus meningkat dari 5,07 menjadi 5,32 dan 5,59. Kondisi ini mencerminkan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada tahun 2021 hingga 2023, Indeks TIK kembali mengalami peningkatan bertahap dari 5,76 menjadi 5,85 dan 5,90. Meskipun kenaikannya relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan digitalisasi tetap berjalan secara stabil.

Pada tahun 2024 nilai indeks meningkat menjadi 6,02 dan kembali naik menjadi 6,10 pada tahun 2025. Nilai tersebut merupakan angka tertinggi selama periode penelitian. Selain itu, pandemi COVID-19 turut mempercepat digitalisasi aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga mendorong lonjakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam kegiatan produktif masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh perangkat teknologi seperti HandPhone atau laptop. Penggunaan HandPhone atau laptop memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan tingkat kemiskinan, karena dapat mempermudah akses terhadap informasi, pendidikan, peluang kerja, serta berbagai aktivitas ekonomi yang berbasis digital (Devi Khoiriyah, 2024).

Kutipan dari penelitian (Ni Wayan Lasmi, 2025) menyatakan Inovasi teknologi yang telah dilakukan belum mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh banyaknya teknologi yang tersedia, tetapi belum digunakan secara efektif oleh masyarakat. Akibatnya, teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas, memperluas akses ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi belum dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengentasan kemiskinan.

Indikator komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM adalah salah satu elemen pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan penekanan pada pengembangan aspek manusia fundamental (Eva Safrinja et al., 2024). Dalam penelitian ini, IPM diposisikan sebagai variabel moderasi, karena

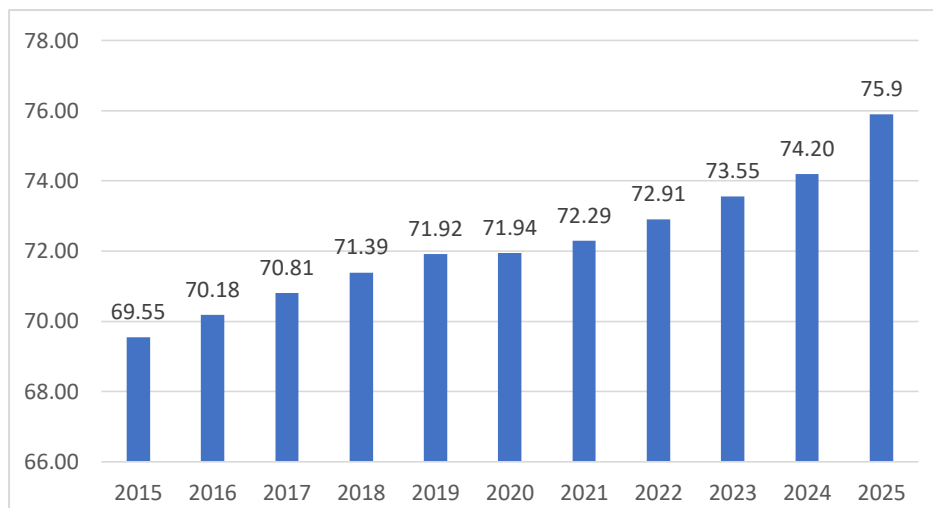
secara teoritis dan empiris IPM mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara demokrasi, TIK terhadap tingkat kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia adalah bagian dari masyarakat atau individu yang dapat mengakses hasil pembangunan seperti pendapatan, umur panjang dan kesehatan, standar hidup layak, dan pengetahuan (Pasaribu et al., 2022). Di Indonesia, data BPS menunjukkan tren penurunan kemiskinan di wilayah dengan IPM yang tinggi (Prastyorini, 2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dua dimensi utama, yaitu aspek yang berkaitan dengan kemampuan dasar manusia seperti pendidikan dan kesehatan, serta aspek pemanfaatan kemampuan tersebut secara produktif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, sosial, dan budaya.

Pencapaian IPM tidak hanya bergantung pada tingkat pembangunan ekonomi semata, karena peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini juga dapat tercermin dari masih terbatasnya kualitas dan akses terhadap fasilitas kesehatan (Winata & Musthofa, 2024). Secara umum, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada rentang 0 hingga 100. Nilai IPM memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pembangunan manusia sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Perkembangan IPM di suatu wilayah juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nasional. Apabila nilai IPM di berbagai daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pembangunan manusia secara nasional cenderung menunjukkan kondisi yang lebih stabil. Sebaliknya, apabila nilai IPM mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat mencerminkan adanya perlambatan dalam peningkatan kualitas

hidup masyarakat (Saputro, 2022). Berikut merupakan gambar 1.5 menjelaskan mengenai indeks pembangunan manusia tahun 2015-2025.

Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2026)

Berdasarkan Gambar 1.4, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun sempat mengalami perlambatan pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2015, nilai IPM Indonesia tercatat sebesar 69,55, kemudian meningkat menjadi 70,18 pada 2016, 70,81 pada 2017, dan 71,39 pada 2018. Tren peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang ditopang oleh peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang layak.

Pada tahun 2019, IPM kembali meningkat menjadi 71,92, namun pada 2020 hanya mengalami kenaikan sangat tipis menjadi 71,94. Perlambatan ini menunjukkan dampak pandemi COVID-19 yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akibat pembatasan aktivitas sosial serta tekanan terhadap sistem layanan publik. Meski demikian, IPM kembali menunjukkan tren positif pasca pandemi, yaitu meningkat menjadi 72,29 pada

2021, 72,91 pada 2022, 73,55 pada 2023, dan mencapai 74,20 pada 2024 dan kembali naik meenjadi 75,90 pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, tren peningkatan IPM tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia secara berkelanjutan. Namun, peningkatan IPM belum sepenuhnya mampu menekan tingkat kemiskinan secara optimal, mengingat masih terdapat ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi antarwilayah. Kondisi ini menegaskan bahwa IPM berperan strategis dalam memperkuat efektivitas berbagai kebijakan pembangunan dan program pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks penelitian ini, IPM digunakan sebagai variabel moderasi, yang secara teoritis dan empiris diduga mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh Indeks Demokrasi, Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terhadap tingkat kemiskinan. Daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik, sehingga mampu memanfaatkan kualitas demokrasi dan kemajuan teknologi secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat pengentasan kemiskinan (Wardani et al., 2023).

IPM adalah ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang diukur melalui capaian pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Daerah dengan nilai IPM yang tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih sehat, berpendidikan, dan produktif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan karena masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan kesempatan kerja yang lebih besar (Apriliandis et al., 2025).

Kemiskinan, masalah struktural, masih menjadi tantangan utama bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Tingkat kemiskinan terus menunjukkan dinamika yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan institusional, meskipun berbagai kebijakan pembangunan telah diterapkan. Pendekatan pembangunan kontemporer melihat kemiskinan sebagai kondisi yang terdiri dari berbagai aspek, dan bukan hanya keterbatasan pendapatan. Sebaliknya, mereka melihat kemiskinan sebagai kondisi yang mencakup kekurangan akses ke pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan tata kelola pemerintah yang buruk. Oleh karena itu, analisis yang lebih menyeluruh diperlukan untuk memerangi kemiskinan. Analisis ini harus memasukkan aspek demokrasi, kemajuan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan telah banyak dilakukan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Namun demikian, hasil penelitian yang ada masih menunjukkan inkonsistensi serta berbagai keterbatasan metodologis dan empiris. Studi tentang pengaruh demokrasi terhadap kemiskinan telah menghasilkan berbagai hasil. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yolanda & Satrianto, 2019) tentang pengaruh korupsi, demokrasi, dan politik terhadap kemiskinan di delapan negara ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi, ditemukan bahwa demokrasi berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel politik berdampak negatif namun signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian lain tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) umumnya menemukan bahwa peningkatan akses dan pemanfaatan TIK meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses ke informasi, peningkatan produktivitas,

dan penciptaan peluang ekonomi baru. Namun, beberapa penelitian masih berfokus pada pengaruh TIK yang langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan belum secara komprehensif menguji peran TIK terhadap kemiskinan dengan mencari tahu bagaimana TIK dapat mengurangi kemiskinan (Ishak & Kartiasih, 2025). Selanjutnya hasil penelitian tentang pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan penurunan indeks dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan (Zanzibar et al., 2024).

Perbedaan dan kompleksitas hubungan antara Indeks Demokrasi, Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa fenomena kemiskinan tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Secara teoritis, melalui peningkatan tata kelola, akses teknologi, dan kualitas sumber daya manusia, ketiga komponen ini dianggap memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, hubungan antara variabel tersebut masih belum dipelajari secara menyeluruh dalam kerangka yang luas. Ini terutama berlaku ketika IPM dianggap sebagai variabel moderasi, yang memiliki kemampuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel lain. Selain itu, metode analisis data panel yang dapat mengidentifikasi dinamika waktu dan wilayah juga terbatas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa kembali hubungan antar variabel dalam penjelasan kemiskinan di Indonesia secara lebih mendalam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan analisis data panel periode 2015–2025 dengan memasukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Indeks Demokrasi, Indeks

Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kualitas pembangunan manusia berperan dalam memperkuat atau memperlemah dampak tata kelola politik, transformasi digital, terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara kualitas demokrasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan mempertimbangkan peran Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi, dengan judul:

“Pengaruh Indeks Demokrasi, Indeks Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Moderasi.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kemiskinan di Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti kualitas demokrasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, kualitas pembangunan manusia diduga berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Demokrasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2015–2025?
2. Apakah Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2015–2025?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2015–2025?

4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu memoderasi pengaruh Indeks Demokrasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu memoderasi pengaruh Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ditetapkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Demokrasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2015–2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2015–2025.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2015–2025.
4. Untuk menganalisis peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam memoderasi pengaruh Indeks Demokrasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
5. Untuk menganalisis peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam memoderasi pengaruh Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dan dari beberapa rumusan masalah serta beberapa tujuan diatas maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya terkait analisis determinan kemiskinan dari perspektif institusional (demokrasi), teknologi (TIK), dan distribusi pendapatan dengan memasukkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi dalam model data panel.

2. Manfaat Praktis

Berikut beberapa manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini:

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam upaya penurunan kemiskinan melalui penguatan demokrasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemiskinan, pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, dan transformasi digital.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan model penelitian dengan menambahkan variabel lain, memperluas periode penelitian, atau menggunakan metode analisis yang berbeda.

1.5 Batasan Penelitian

1. Lokasi penelitian adalah Negara Indonesia dengan unit analisis 34 provinsi.
2. Variabel yang digunakan yaitu tingkat kemiskinan(Y) sebagai variabel dependen, serta Indeks Demokrasi (X1), Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (X2) sebagai variabel independen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Z) sebagai variabel moderasi.
3. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan periode pengamatan tahun 2015–2024 menggunakan data panel (time series dan cross section).